

PENGARUH LEMAHNYA AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA PADA KABUPATEN BOALEMO

Fibriyanti S. Lakoro¹, Wulan Sitria Paneo², Gebi Umbola³

¹Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

²Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

³Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Penulis korespondensi: fibriyantilakoro@ubmg.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh lemahnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini, dilakukan sehingga masih sangat tingginya kasus penyalahgunaan dana desa yang disebabkan rendahnya transparansi dan lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif melalui metode survei dalam melaksanakan dengan penyebaran kuesioner bagi aparat desa yang memang terlibat dalam pengelolaan dana desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 orang. Metode analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) melalui aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian adalah lemahnya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa. Rendahnya transparansi, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa serta lemahnya pengendalian internal menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya penyimpangan dana desa. Selain itu, lemahnya pengawasan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa karena pengawasan internal maupun eksternal yang belum optimal menyebabkan rendahnya kontrol terhadap penggunaan anggaran desa. Hasil pengujian SEM-PLS membuktikan bahwa lemahnya akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa, yang ditunjukkan oleh nilai t-statistics sebesar 4,873 dan p-values sebesar 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendah akuntabilitas pemerintah desa, maka semakin tinggi potensi penyalahgunaan dana desa. Selain itu, lemahnya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa dengan nilai t-statistics sebesar 5,216 dan p-values sebesar 0,000.

KATA KUNCI

Akuntabilitas, Pengawasan,
Penyalahgunaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

Dana desa adalah program yang memang sangat strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan desa dengan adanya pengelolaan keuangan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel (Radhiyya et al., 2025). Besarnya alokasi dana desa yang memang terus meningkatkan setiap tahun sehingga menuntut agar pemerintah desa agar dapat tata kelola keuangan yang diharuskan dilaksanakan dengan baik agar dapat terhindar dari penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Pengelolaan dana desa dengan efektif yang tidak hanya memiliki tujuan harus meningkatkan pembangunan fisik desa, tetapi yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ekonomi bagi masyarakat desa.

Untuk pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa memang sehingga perlu mengacu sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran yang memang sudah sesuai aturan dalam dasar undang-undang (Putra & Rasmini, 2019). Pemerintah desa sangat dituntut agar mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara tertib serta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (Pahlevi et al., 2022). Sehingga secara kenyataan memang masih ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa, seperti rendahnya kompetensi (Dasila, 2025). Akuntabilitas dan pengawasan memang harus dilaksanakan dengan sangat penting agar dapat mewujudkan pengelolaan dana desa harus dilaksanakan memang secara efektif, efisien dan bebas dari praktik korupsi (Oktaria & Alexandro, 2021).

Dasar hukum yang memang dijelaskan bahwa implementasi yang secara sistem memang lebih membahas akuntabilitas pada Indonesia dengan beberapa masalah besar, diantaranya kurang terlaksananya koordinasi baik antar lembaga, intervensi politik, serta kurangnya optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi (Jihan Nabilatul Azzah & Arif Hidayat, 2025). Fenomena yang terjadi dalam penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, menjadi salah satu perhatian publik terutama dalam dugaan korupsi dana desa seperti di Desa Hungayonaa. Mantan kepala desa dan bendahara desa yang memang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa pada tahun anggaran 2019 (Admin, 2025).

Kerugian negara yang mencapai Rp 285.000.000 berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Boalemo. Dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan fasilitas Bulalove yang tidak selesai dan berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran yang diduga fiktif (Nawu, 2024). Selain itu, pada tahun 2025 kasus yang sudah masuk pelimpahan pada Kejaksaan Negeri Boalemo dalam proses hukum lebih lanjut. Kasus lain ada pada Desa Suka Mulya di Boalemo yaitu mantan kepala desa dan mantan bendahara yang ditahan Polres Boalemo (Harpost, 2024).

Disebabkan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2020 dengan adanya penyelewengan dana desa pada tahun 2020 dengan kerugian pada negara mencapai Rp 700 juta serta dana desa sebesar Rp. 1,2 miliar. Dana yang diduga digunakan investasi forex dan kepentingan pribadi. Berdasarkan pengakuan tersangka, penggunaan dana desa diduga investasi yang dilakukan karena harapan mendapatkan keuntungan dalam menutupi hutang pribadi (Gorontalo, 2024). Berbagai kasus yang menunjukkan kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dinilai belum optimal pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa sehingga dinilai belum optimal pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa sehingga membuka peluang terjadi tindak pidana korupsi.

Berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antaran akuntabilitas, pengawasan, dan penyalahgunaan dana desa. Penelitian oleh Farida, dkk (2021), penelitian yang dilaksanakan pada sejumlah desa pada

Kabupaten Purworejo menemukan ternyata akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Penelitian lain Nur (2025), penelitian ini menghasilkan penjelasan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sudah berjalan baik. Penelitian lain, Kholik (2024) penggunaan teknologi informasi sehingga memberikan dukungan dalam sistem pengawasan yang lebih efisien. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan adanya *research gap* berkaitan dengan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan yang memberikan pengaruh penyalahgunaan dana desa, khususnya pada pemerintah Kabupaten Boalemo.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam literatur pengelolaan keuangan desa saat ini, terletak pada kecenderungan analisis secara parsial. Dalam penelitian Saputra & Ramdany memiliki fokus secara eksklusif pada dimensi akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor pencegahan penyimpangan, namun kurang mendalami efektivitas pengawasan lapangan secara teknis. Di sisi lain, penelitian Handayani, et. al lebih menitikberatkan pada mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat tanpa mengaitkan secara mendalam dengan sistem pertanggungjawaban administratif.

Kebaruan penelitian ini, terletak pada upaya dalam mengisi kekosongan literatur dalam pengujian simultan antara akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyalahgunaan dana desa dalam satu model analisis kuantitatif yang *integrative*. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan cakupan sampel luas di seluruh lebih *generalizable* dan objektif dibandingkan penelitian terdahulu yang sifatnya terbatas. Selain itu, kekuatan sosialogis penelitian dapat diperkuat dalam penggunaan data empiris mutakhir berkaitan dengan praktik pertanggungjawaban fiktif, proyek pembangunan mangkrak, hingga kasus spesifik penyalahgunaan dana dalam investasi pribadi seperti fenomena investasi forex di Desa Suka Mulya. Integrasi antara model teoritis yang lebih komprehensif dan fenomena empiris terbaru pada Kabupaten Boalemo yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis dalam literatur akuntansi publik maupun secara praktis pada perbaikan sistem pengawasan keuangan desa di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam pemberian tanggung jawab atau memberikan jawaban terhadap kinerja berdasarkan tindakan secara individu serta memiliki badan hukum serta pimpinan pada organisasi sesuai dengan pihak yang memiliki hak dan kewenangan dalam meminta keterangan serta tanggung jawabnya (Mappisabbi, F. et al., 2024). Akuntabilitas merupakan langkah pemerintahan serta efektivitas dalam proses yang berdasarkan seperti apa kekuasaan dalam melaksanakan berbagai langkah untuk pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga dilakukan secara konstitusional berdasarkan ketentuan hukum (Musfirah, A. et al., 2021). Akuntabilitas adalah kewajiban pada berbagai pihak pemegang amanah dalam pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan serta memberikan ketentuan aktivitas sehingga memiliki pertanggungjawaban pada beberapa pihak dalam memberikan amanah sesuai dengan kewenangan hak dan kewenangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis diantaranya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mahmudi, 2019). Akuntabilitas vertikal merupakan tanggung jawab yang didasarkan pengelolaan dana berdasarkan otoritas yang sesuai, contoh pemberian tanggung jawab pada unit kerja di Pemerintah Daerah, tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat pada MPR. Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban yang luas terutama pada publik.

Akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran yang menggambarkan akuntabilitas lembaga publik yang memiliki perilaku yang jujur dalam mengikuti pada ketentuan yang sudah berlaku. Akuntabilitas manajerial, menjadi tanggung jawab lembaga publik dalam melaksanakan pengelolaan organisasi dengan efisien dan efektif. Akuntabilitas program, yaitu adanya pertimbangan seperti apa tujuan yang ditetapkan dalam mencapai atau tidaknya apakah pertimbangan yang didasarkan pada alternatif yang hasil yang lebih optimal. Akuntabilitas kebijakan berkaitan tanggung jawab yang ada pada lembaga publik serta didasarkan pada kebijakan yang telah diambil (Mahmudi, 2019).

Rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan lemahnya sistem pertanggungjawaban, kurangnya transparansi laporan keuangan serta lemahnya pengendalian internal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Lemahnya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo.

Teori Pengawasan

Schermerhorn (Andriani & Dewi, 2018) menjelaskan pengawasan merupakan langkah yang dilaksanakan sesuai dengan kinerja yang diukur dalam memberikan pengambilan tindakan berdasarkan dukungan dalam mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Poerwadarminta (Amalia & Sururama Rizki, 2020) mengemukakan pengawasan dijelaskan dengan cara melihat baik, terutama penglihatan, tajam pada titik, kewaspadaan serta lainnya.

Robbins dan Coulter (Satriadi, 2016) menjelaskan beberapa indikator dalam pengawasan terdiri atas, menciptakan standar yang disesuaikan patokan serta pada target yang disesuaikan pada hasil yang diinginkan, sehingga dilaksanakan melalui perbandingan hasil secara langsung pada kegiatan dalam organisasi. Indikator kedua dalam pengukuran yang dilaksanakan dalam proses secara berulang yang dilaksanakan sehingga sesuai dan terus menerus, selain itu intensitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Indikator ketiga dalam perbandingan berdasarkan hasil dapat dicapai berdasarkan target dan standar yang sudah ditetapkan, sehingga dapat disesuaikan kinerja yang lebih tinggi dan rendah berdasarkan standar. Indikator keempat, dilaksanakan melalui tindakan berdasarkan keputusan dalam pengambilan tindakan koreksi dan perbaikan.

Lemahnya pengawasan, baik yang dilakukan oleh aparat internal maupun eksternal dapat menyebabkan rendahnya kontrol terhadap penggunaan dana desa sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Lemahnya pengawasan berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo

Pengaruh Lemahnya Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

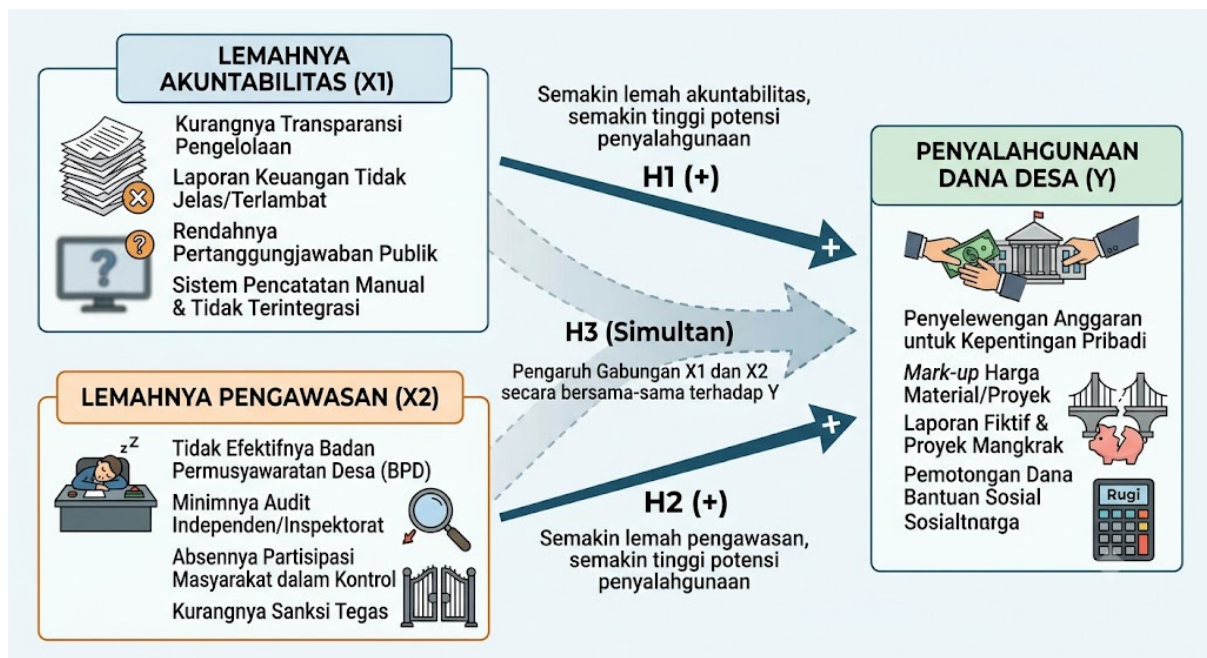
Akuntabilitas dan pengawasan merupakan dua aspek penting dalam tata kelola keuangan desa. Lemahnya akuntabilitas yang disertai pengawasan yang tidak efektif sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dana desa karena proses pengelolaan keuangan tidak berjalan secara

transparan dan tidak diawasi dengan optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Lemahnya akuntabilitas dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo.

Penyalahgunaan Dana Desa

Penyalahgunaan dana desa merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal (Andika Danang Saputra; et al., 2024). Penyalahgunaan dana desa merupakan kejahatan yang sangat besar dalam menghadapi siapa yang ada pada lingkungan sekitarnya, tidak adanya pengenalan berdasarkan jabatan serta status secara sosial. Penyalahgunaan dana desa di Indonesia yang telah terjadi pada sesuai sektor bahkan sudah menjadi virus yang terus menular (Alexander, 2021).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Lemahnya Akuntabilitas terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

Akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan pengelolaan dana desa yang tidak dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa. Pertanggungjawaban yang tidak jelas, laporan keuangan yang tidak transparan dan lemahnya pengendalian internal sehingga menjadi faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dana desa.

H1: Lemahnya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo.

Pengaruhnya Lemahnya Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

Pengawasan yang lemah menyebabkan rendahnya kontrol terhadap penggunaan dana desa sehingga membuka peluang yang terjadi penyelewengan anggaran. Tidak optimalnya pengawasan internal maupun eksternal dapat menyebabkan penyalahgunaan dana desa sulit terdeteksi sejak awal.

H2: Lemahnya pengawasan berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo.

Pengaruhnya Lemahnya Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

Lemahnya akuntabilitas dan pengawasan secara bersama-sama dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan dana desa karena dalam mengelola keuangan di desa memang tidak dapat disesuaikan dengan bentuk transparan dan tidak diawasi secara efektif.

H2: Lemahnya akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilaksanakan melalui pendekatan kuantitatif melalui metode survei dalam menganalisis pengaruh lemahnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Boalemo. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam menganalisis penelitian dengan tujuan menguji hubungan antar variabel melalui pengukuran data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2022). Variabel independen untuk penelitian adalah lemahnya akuntabilitas (X_1) dan lemahnya pengawasan (X_2), sedangkan variabel dependen adalah penyalahgunaan dana desa (Y).

Lokasi penelitian pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan Lokasi didasarkan pada fenomena penyalahgunaan dana desa yang terjadi pada beberapa Kabupaten Boalemo sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Populasi penelitian adalah aparat desa yang berkaitan dan terlibat langsung pada pengelolaan dana desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa atau Kaur Keuangan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* melalui kategori sampel yang memiliki keterlibatan dengan langsung terutama pada pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana desa (Sekaran & Boungie, 2017).

Teknik analisis data penelitian dilaksanakan melalui aplikasi *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) sehingga adanya bantuan aplikasi SmartPLS. Metode SEM-PLS digunakan dalam melakukan analisis berkaitan atau memiliki hubungan baik variabel laten dengan simultan berdasarkan penelitian dengan jumlah sampel yang relatif kecil dan data yang tidak hanya harus distribusi normal (Hair, J. F. et al., 2021). Analisis data dilaksanakan pada 2 bagian antara lain outer model dan inner model. Pengujian outer model yang dilaksanakan dalam menguji validitas dan reliabilitas konstruk melalui *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Selanjutnya, pengujian linear model dilaksanakan dalam menguji hubungan antar variabel melalui nilai *R-square*, *path coefficient* serta uji hipotesis melalui *bootstrapping* dalam menggambarkan pengaruh langsung antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan responden berasal dari aparat desa pada Kabupaten Boalemo diantaranya kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Jumlah kuesioner disebarikan sebanyak 120 kuesioner dan seluruhnya dapat diolah dalam penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	20	16,7%
2	Sekretaris Desa	30	25,0%
3	Kaur Keuangan	40	33,3%
4	Anggota BPD	30	25,0%
Jumlah		120	100%

Source: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian maka tabel yang dibuatkan di atas, menjelaskan bahwa responden yang banyak berasal dari Kaur Keuangan atau Bendahara desa sebesar 33,3%. Sehingga memberikan penjelasan bahwa responden yang ada terlibat langsung melalui pengelolaan dana desa agar dapat dinilai memahami proses pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Evaluasi Outer Model

Pengujian outer model dilaksanakan dalam mengukur validitas dan reliabilitas konstruk penelitian terdiri dari *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*.

Tabel 2. Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Lemahnya Akuntabilitas	X1.1	0,812
	X1.2	0,845
	X1.3	0,801
	X1.4	0,789
Lemahnya Pengawasan	X2.1	0,833
	X2.2	0,857
	X2.3	0,814
	X2.4	0,798
Penyalahgunaan Dana Desa	Y1.1	0,841
	Y1.2	0,873
	Y1.3	0,826
	Y1.4	0,809

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Hasil pengujian reliabilitas sesuai dengan hasil variabel yang memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70 dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50. Sehingga untuk konstruk sesuai penelitian dinyatakan reliabel serta memenuhi syarat validitas konstruk.

Evaluasi Inner Model

Pengujian inner model dilaksanakan sehingga mengetahui adanya pengukuran model sesuai dengan penjelasan hubungan antara variabel penelitian.

Tabel 4. Nilai *R-Square*

Variabel Dependen	R-Square
Penyalahgunaan Dana Desa	0,728

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Pengujian Hipotesis

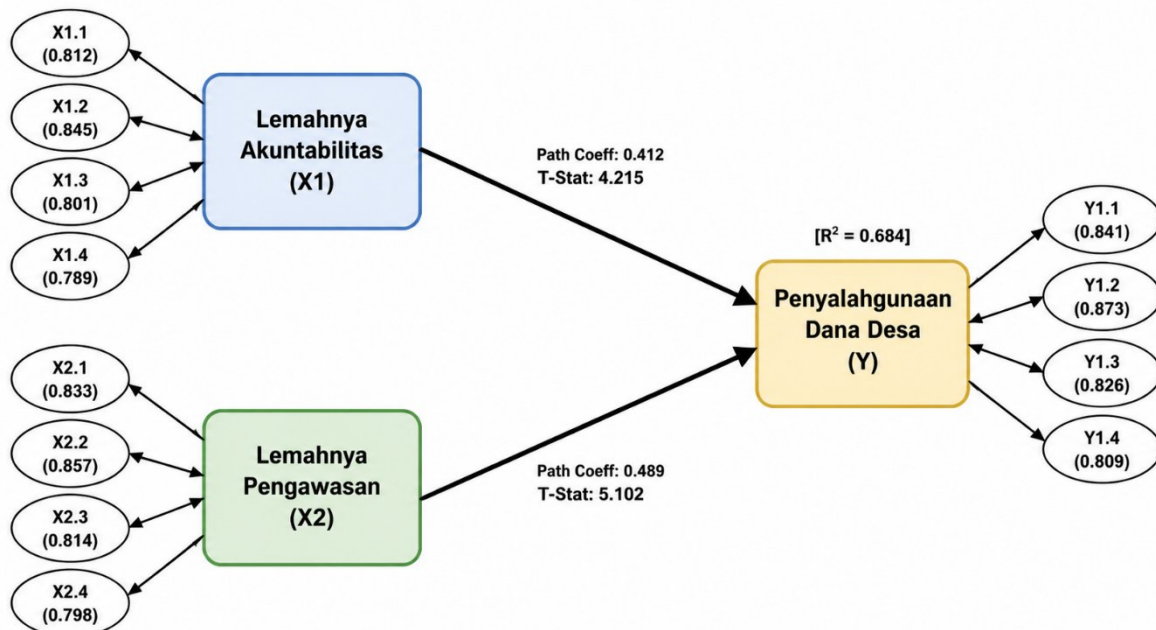
Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan menggunakan *bootstrapping* pada aplikasi SmartPLS dengan melihat nilai *path coefficient*, *t-statistics* dan *p-values*.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Path Coefficient	T-Statistics	P-Values	Keterangan
Lemahnya Akuntabilitas → Penyalahgunaan Dana Desa	0,421	4,873	0,000	Diterima
Lemahnya Pengawasan → Penyalahgunaan Dana Desa	0,487	5,216	0,000	Diterima

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Hasil pengujian SEM-PLS membuktikan bahwa hipotesis memberikan hasil berupa lemahnya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa berdasarkan nilai pada *t-statistics* sebesar 4,873 dan *p-values* sebesar 0,000. Hasil pengujian membuktikan bahwa semakin rendah akuntabilitas, pemerintah desa maka semakin tinggi potensi penyalahgunaan dana desa. Selanjutnya lemahnya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa dengan nilai *t-statistics* sebesar 5,216 dan *p-values* sebesar 0,000. Sehingga memberikan hasil seperti berikut lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal dapat meningkatkan peluang yang terjadinya penyimpangan dana desa.



Sumber: Output SmartPLS, 2026
Gambar 2. Model Struktural SEM-PLS

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sangat lemahnya akuntabilitas dan memiliki pengaruh positif terhadap penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo. Rendahnya transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa menyebabkan peluang yang akan terjadi akibat penyimpangan anggaran sangatlah besar. Kondisi ini akan menyebabkan laporan pertanggungjawaban yang memang dinilai belum optimal, lemahnya pengendalian internal serta

rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian mendukung teori akuntabilitas yang dikemukakan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian yang lain membahas peluang kecurangan muncul yang diakibatkan lemahnya yang sesuai dengan sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan dan terbatasnya transparansi serta dalam menciptakan situasi penyimpangan keuangan yang terjadi tanpa terdeteksi (Vanessa Yosepha Empol et al., 2025). Dalam meningkatkan pemahaman setiap peserta melalui aspek secara hukum serta praktis dalam hal pencegahan korupsi serta adanya pengelolaan keuangan desa, dalam penerapan prinsip secara transparan, akuntabel serta keterlibatan masyarakat memang sangatlah penting terutama pengelolaan keuangan desa secara bersih serta transparan (Kadir, 2025). Temuan penelitian lain menjelaskan bahwa pengawasan menjadi bagian dalam meminimalisir risiko penyalahgunaan dana desa dalam sistem pengendalian dan pemanfaatan teknologi yang baik (Kholik, 2024). Bahkan penelitian lain, menjelaskan bahwa rendahnya akuntabilitas menjadi faktor penting dalam penyalahgunaan dana desa (Alexander, 2021).

Secara simultan, lemahnya akuntabilitas dan pengawasan memberikan pengaruh besar terhadap penyalahgunaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang memerlukan sistem pertanggungjawaban yang transparan serta pengawasan yang efektif dalam meminimalisir risiko penyimpangan anggaran. Pemerintah desa memang sangat perlu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat pengawasan internal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga menggunakan anggaran yang dikelola dengan efektif, transparan dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan lemahnya akuntabilitas memiliki pengaruh positif serta signifikan pada penyalahgunaan dana desa bagi desa di Kabupaten Boalemo. Rendahnya transparansi, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa serta lemahnya pengawasan berpengaruh positif serta signifikan terhadap penyalahgunaan dana desa. Pengawasan internal maupun eksternal yang belum optimal menyebabkan rendahnya kontrol terhadap penggunaan dana desa sehingga penyimpangan anggaran sangat sulit terdeteksi sejak awal.

Hasil analisis menggunakan metode SEM-PLS memberikan gambaran lemahnya akuntabilitas dan pengawasan secara simultan mampu menjelaskan penyalahgunaan dana desa sebesar 72,8%. Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Boalemo. Pemerintah desa sangat perlu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat sistem pengawasan pengelolaan dana desa sehingga penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan transparan, efektif, dan akuntabel.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian yang dilaksanakan dengan adanya keterbatasan yang memberikan pengaruh pada hasil penelitian. Pertama yang dilaksanakan penelitian pada Pemerintah Desa di Kabupaten Boalemo hasil penelitian yang belum di generalisasi pada seluruh pemerintah desa di daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua, penelitian hanya menggunakan dua variabel independen menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan dalam menjelaskan penyalahgunaan dana desa, sedangkan masih terdapat faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi penyalahgunaan dana desa seperti kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat. Ketiga, pengumpulan data penelitian dengan penggunaan kuesioner dalam memberikan jawaban dari responden sangat bergantung pada tingkat pemahaman, persepsi dan kejujuran responden

dalam memberikan jawaban. Keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum melakukan wawancara mendalam dalam memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait fenomena penyalahgunaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti yang diberikan melalui saran yang diharapkan memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis. Pemerintah desa di Kabupaten Boalemo diharapkan sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dilaksanakan dalam menyusun laporan keuangan agar transparan, tepat waktu serta mudah di akses bagi masyarakat atau publik. Pengawasan internal maupun eksternal sangat diperkuat melalui peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah serta partisipasi masyarakat melalui pengawasan dalam penggunaan dana desa dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran. Bagi penelitian selanjutnya, sangat diharapkan dapat menambahkan variabel.

REFERENSI

- Admin. (2025). *Korupsi Dana Desa Hungayonaa: Mantan Kades dan Bendahara Resmi Ditahan*. GoPublish.Co.Id. <https://gopublish.co.id/?p=7538>
- Alexander, P. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor I/Pid. Sus-TPK/2019/PN/Medan)*. Universitas Meda Area.
- Amalia, R., & Sururama Rizki. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV Cendekia Press.
- Andika Danang Saputra, Rizqa Noviana Putri, & Tegar Catur Kurniawan. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan: Tinjauan Tahun 2018-2023. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 1–6.
- Andriani, L., & Dewi, I. (2018). *Pengantar Manajemen*. UMSIDA Press.
- Dasila, R. A. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 195–207. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>
- Farida, N. I., Suyono, N. A., & Susanti. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi , Kompetensi Akuntansi , Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Sejumlah Desa Di Kabupaten). *Journal of Economic*, 2(2), 263–272.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi. Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gorontalo, K. (2024). *Dana Desa Dipakai Investasi Forex, Mantan Kades dan Bendahara Desa di Boalemo Jadi Tersangka Korupsi*. KOMPAS TV. <https://www.kompas.tv/regional/512849/dana-desa-dipakai-investasi-forex-mantan-kades-dan-bendahara-desa-di-boalemo-jadi-tersangka-korupsi>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Harpost, A. (2024). *Mantan Kades dan Bendahara di Boalemo Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi ADD*. HARIAN POST Id. <https://harianpost.id/mantan-kades-dan-bendahara-di-boalemo-ditetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-add/>
- Jihan Nabilatul Azzah, & Arif Hidayat. (2025). Penguatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis Whole of Government Approach Dalam Perspektif Dynamic Governance. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i1.1231>
- Kadir, Y. (2025). PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus: Desa Deme Dua dan Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*, 7(1), 719–736.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32662/insancita.v7i1.3947>

- Kholik, K. (2024). Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4803–4811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 174–184.
- Musfirah, A., Puspita, A., & Hasriani. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pustaka Almaida.
- Nawu, A. (2024). *Eks Kades-Bendahara Desa di Boalemo Jadi Tersangka Korupsi Rp 285 Juta*. Detiksulsel. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7634290/eks-kades-bendahara-desa-di-boalemo-jadi-tersangka-korupsi-rp-285-juta>
- Oktaria, M., & Alexandro, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa. *Edunomics Journal*, 2(2), 64–72.
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1480–1486.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Radhiyya, M. A. R., Romarina, A., Radhiyya, M. A. R., & Romarina, A. (2025). Implementasi Prinsip Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 439–447. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5080>
- Satriadi. (2016). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri Binaan Tanjungpinang. *Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), 288–295. <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/economica/article/view/583>
- Sekaran, U., & Boungie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat.
- Siskawati Nur, Siti Pratiwi Husain, & Lukman Pakaya. (2025). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Raharja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(8), 3128–3137. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i8.8150>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Vanesa Yosepha Empol, Anthon Simon Y. Kerihi, & Minarni A. Dethan. (2025). Analisis Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Fraud Triangle Theory (Studi Empiris di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 208–222. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/1982>